

# HUMAS UNIVERSITAS INDONESIA

## KLIPING

**KLASIFIKASI** : Universitas Indonesia – Penulis  
**TEMA** : Dari Chuan Leek Pai hingga Thaksin Shinawarta  
**SURAT KABAR/MAJALAH** :

Hari Tanggal Bulan Tahun Halaman Kolom

### RINGKASAN :

Dominasi Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawarta selama tiga bulan terakhir pemerintahannya makin menonjolkan gaya kepemimpinan individual, personal, dan tidak bersemangat kolegial. Dia dituduh Mahkamah Konstitusional tidak mencantumkan sebagian kekayaannya yang wajib disampaikan ketika menjabat sebagai Deputy PM Thailand 1997. Banyaknya pengangguran dan pengusaha yang beralih profesi, menyebabkan ia harus mengundurkan diri pada tanggal 3 November 1997 dan digantikan oleh Chuan Leek Pai dari Partai Demokrat. Dia mendapat kekuasaan dengan diuntungkan oleh dua kondisi: Pertama, kegagalan pemerintahan Chavalit tentunya akan memberikan legitimasi yang besar kepada pemerintahan Chuan. Kedua, merupakan partai tertua di Thailand. Organisasinya paling rapi dibandingkan yang lainnya. Tetapi yang terpenting adalah mendapat dukungan dari para teknokrat paling andal di negerinya. Pemerintahan Chuan Leek Pai, dengan memanfaatkan momentum krisis, berhasil memberikan keleluasaan yang besar bagi para tim teknokratnya untuk membuat kebijakan perekonomian. Hasilnya dapat dilihat dari pembentukan Financial Restructuring Agency, penjualan aset dan intervensi terhadap empat bank yang insolvent. Tindakan-tindakan tersebut memberi fondasi yang cukup kuat bagi sistem perekonomian, khususnya keuangan, dalam menjalankan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian dalam membuat suatu kebijakan.

### CATATAN :

# Dari Chuan Leek Pai hingga Thaksin Shinawatra

Oleh  
VISHNU JUWONO DAN HERDI SAHRASAD

**D**ominasi Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra selama tiga bulan terakhir pemerintahannya makin mengindikasikan gaya kepemimpinannya yang one man show. Ia menonjolkan gaya kepemimpinan individual, personal, dan tidak bersenjata kolejial. Kepemimpinan Thaksin kini dalam sorotan masyarakat di dalam dan luar negeri, menyusul pemeriksaan Mahkamah Konstitusional yang menuduh ia tidak mencantumkan sebagian kekayaannya yang wajib disampaikan ketika menjabat sebagai Deputy PM Thailand tahun 1997.

Dalam pembelaannya di hadapan Mahkamah Konstitusional, Thaksin menangis dan menyatakan ia tak pernah korupsi. Proses peradilan Thaksin yang dimulai sejak April lalu dianggap sebagai ujian bagi reformasi konstitusional Thailand yang diperkenalkan tahun 1997 dengan tujuan memberantas korupsi-kolusi dan menciptakan good governance, suatu pemerintahan yang dikelola dengan efektif, transparan, dan berakuntabilitas publik.

Akibat perkara Thaksin ini, para investor dan masyarakat bersikap wait and see, "menunggu dan melihat" perkembangan politik dan perbaruan lebih lanjut di negeri Siam itu. Tulisan ini merupakan tinjauan ekonomi politik perkembangan Thailand dewasa ini.

Krisis Thailand terjadi tahun 1997, di mana krisis Asia mulai meletus. Diawali adanya tekanan dari spekulator internasional terhadap mata uang Bath Thailand sehingga menjadi 258 perUS\$ pada masa Juni-Juli 1997. Akibatnya, Thailand mengalami kontraksi perekonomian yang cukup besar yakni mengalami penurunan GDP 4,7%, menurut data resmi IMF. Di bawah PM Chavalit Yongchaiyuth pada waktu itu harus meminta bantuan kepada IMF dan pada akhirnya mendapat dana bantuan sebesar US\$17 Milyar. Implikasi politik dari krisis perekonomian ini adalah terjadinya pergantian rezim kekuasaan pada Thailand. Kegagalan Chavalit mengatasi krisis ekonomi di Thailand telah menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan protes di kalangan rakyat dan mahasiswa. Banyaknya pengangguran dan pengusaha yang beralih profesi, menyebabkan ia harus mengundurkan diri pada tanggal 3 November 1997 dan digantikan oleh Chuan Leek Pai dari Partai Demokrat. Era Chuan Leek Pai Perdana Menteri Chuan Leek Pai mendapat kekuasaan dengan diuntungkan oleh dua kondisi: Pertama, kegagalan pemerintahan Chavalit tentunya akan memberikan legitimasi yang besar kepada pemerintahan Chuan

Leek Pai, adalah Partai Demokrat, yang dipandang sebagai partai tertua di Thailand. Organisasinya paling rapi dibandingkan partai lainnya. Tetapi yang

terpenting adalah mendapat dukungan dari para teknokrat paling andal di negerinya. Sehingga tidak heran dalam kabinet Chuan portofolio ekonomi diduduki oleh kaum teknokrat. Misalnya, Menteri Keuangan Tarrin Nimmanahaeminda adalah lulusan Harvard Business School dan pernah berkarir lama di Citibank. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Perdagangan dipegang oleh Supachai Panitchpakdi yang setelah menyelesaikan masa tugasnya menjabat Direktur Jenderal World Trade Organisation (WTO). Posisi Gubernur Bank Sentral, jabatan yang amat penting bagi kebijakan moneter, dipegang oleh Chattumongkol Sonakul seorang pakar lulusan dari John F. Kennedy School of Government, Harvard University. Dengan melihat latar belakang pendidikan dan pengalaman mereka, niaka tidak heran IMF dengan mudahnya melakukan kerjasama dalam membuat dan memonitor pelaksanaan program pemulihan (reformasi) ekonomi karena kesamaan visi, keterampilan dalam mengidentifikasi, menganalisa, dan menyelesaikan masalah perekonomian.

Setelah mendapat mandat yang cukup besar, langkah pertama yang dilakukan oleh Perdana Menteri Chuan adalah konsolidasi Politik dengan merangkul lima partai yaitu Chart Thai, SAP, Cobra Faction, Solidarity dan Seritham. Partai Demokrat dalam koalisi tersebut mempunyai suara terbesar sehingga mampu menempatkan orang-orang profesionalnya, seperti Tarrin, Chattumongkol, dan Supachai, pada posisi ekonomi yang penting sebagai prakondisi terbentuknya suatu pemerintahan.

Walaupun sudah berhasil membentuk pemerintahan akan tetapi secara politis pemerintahan Chuan berhadapan dengan kalangan oposisi, pengusaha swasta dan pengunjuk rasa dari golongan buruh atau petani yang tidak setuju dengan kebijakan perekonomian ketat yang dicanangkan oleh pemerintahannya dengan restu IMF.

Hal ini masih ditambah lagi dengan adanya perselisihan diantara menteri-menteri di bidang ekonomi. Secara umum Tarrin cenderung untuk mengikuti "resep" IMF yang tidak setuju dengan intervensi pemerintah kepada pihak swasta. Sedangkan di sisi lain Supachai lebih menginginkan adanya stimulus yang diberikan pemerintah kepada pihak swasta dengan tujuan menggerakkan roda perekonomian secepatnya. Namun perbedaan kedua kubu tersebut tetap pada kerangka rasionalitas dan di atas ketentuan hukum yang berlaku, serta yang terutama adalah tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap keseluruhan program pemulihan ekonomi.

Pemerintahan Chuan Leek Pai, dengan memanfaatkan momentum krisis, berhasil memberi keleluasaan yang besar bagi para tim teknokratnya untuk membuat kebijakan perekonomian. Hasilnya dapat dilihat dari pembentukan Financial Restructuring Agency, penjualan aset dan intervensi terhadap empat bank yang insol-

vent. Tindakan-tindakan tersebut memberi fondasi yang cukup kuat bagi sistem perekonomian, khususnya keuangan, dalam menjalankan prinsip good governance, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian (prudent) dalam membuat suatu kebijakan.

Selain membangun fondasi yang kuat bagi perekonomian Thailand, pemerintahan Chuan berusaha memelopori penegakkan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, dan hubungan keluarga. Korban dari upaya penegakkan hukum ini salah satunya adalah menteri dalam negeri Thailand, posisi nomor dua terpenting di kabinet, yang membawa pukulan politik bagi pemerintahannya. Selain itu Thaksin Shinawatra, PM Thailand saat ini, juga menjadi korban dari upaya penegakkan hukum di Thailand. Ia dituduh oleh National Counter-Corruption Commission (NCCC), suatu badan independen yang dibentuk pada tahun 1997 yang mempunyai misi mengungkap kasus-kasus korupsi, menyembunyikan harta pribadinya milyaran baht pada saat pengumuman jumlah aset pribadi sebagai syarat untuk dilantik menjadi Wakil Perdana Menteri pada tahun 1997. Apabila tuduhan tersebut terbukti benar, Thaksin tidak diperkenankan untuk berpolitik selama 5 tahun.

Pemerintahan Chuan berakhir pada saat pemilu yang diadakan pada 6 Januari 2001, dimana partai Thai Rak Thai di bawah pimpinan Thaksin Shinawatra memenangkan pemilu dengan hampir meraih mayoritas mutlak dalam jumlah kursi di parlemen. Selain disebabkan adanya skandal yang menimpa menteri dalam negeri, Partai Demokrat juga menjadi korban dari reformasi ekonomi yang dijalankannya. Dengan kebijakan keuangan ketat menyebabkan masyarakat Thailand, terutama yang berada di desa, habis kesabarannya untuk menunggu pemulihan ekonomi. Akibatnya mereka berpaling kepada populisnnya.

Thaksin yang menawarkan program Namun harus diakui bahwa Pemerintahan Chuan Leek Pai memberikan landasan yang kuat bagi negara Thailand dalam menjalankan program reformasi hukum, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kenyataan tersebut pemerintahan Thaksin mempunyai tugas yang maha berat yaitu dituntut untuk meneruskan program reformasi ekonomi yang telah dirintis dengan baik oleh pemerintahan Chuan Leek Pai serta menunjukkan hasil yang lebih nyata dan lebih baik.

Bertahunnya Perdana Menteri Chuan Leek Pai sampai dengan diadakannya pemilu Januari lalu, menunjukkan bahwa secara politis Chuan Leek Pai dapat bertahan dan menjalankan kebijakan-kebijakan reformasi struktural ekonomi Thailand. Tentunya ini berbeda dengan Perdana Menteri - Perdana Menteri Thailand sebelumnya yang selalu dijatuhkan oleh parlemen sebelum menyelesaikan masa jabatannya karena mendapat mosi tidak percaya.

Penyelenggaraan pemilu yang

demokratis, yang tingkat kecurangannya dapat ditekan dan relatif damai, seakan-akan merupakan jawaban dari masyarakat Thailand bahwa mereka telah siap untuk berdemokrasi dan mengikuti proses politik secara sehat. Pemerintahan Thailand baru dibawah pimpinan Perdana Menteri Thailand Thaksin Shinawatra, sebagai pemenang pemilu dengan jumlah kursi parlemen lebih dari 50%, -suatu kemenangan pertama dengan mayoritas mutlak sebagai "mandat historis" Thai Rak

Thai dalam sejarah demokrasi Thailand- tentunya tidak menghadapi masalah politis untuk meloloskan kebijakan-kebijakannya.

Tetapi pada masa dekat, situasi perpolitikan Thailand akan mendapat ujian yang sangat besar pada saat timbulnya keputusan pengadilan terhadap Thaksin atas tuduhan menyembunyikan harta kekayaan pribadi yang mestinya diumumkan kepada publik. Sebab bila terbukti bersalah, Thaksin harus melepaskan jabatannya sebagai Perdana Menteri. Thaksin yang menangis di depan Mahkamah Konstitusional ketika menyampaikan pembelaannya untuk berkelit dari dakwaan korupsi yang bisa menodai dan menghentikan karir politiknya. Dalam perspektif ekonomi, Thailand era Chuan dapat dengan sukses menjalankan sebagian besar program pemulihan yang diberikan oleh IMF sebagai syarat untuk dicairkannya dana bantuan. Hal ini ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi, berkurangnya tingkat pengangguran, investasi mulai berjalan, dan pertumbuhan ekspor yang cukup baik. Pemulihan ekonomi di negara ini ditunjang pula oleh kebijakan moneter dan fiskal. Maka tidak mengherankan bahwa Thailand bisa cepat keluar dari krisis.

### Kelemahan Thaksin

Pada era Thaksin yang agak kontroversial ini, beberapa capaian sukses Chuan Leek Pai itu kini dikawatirkan oleh masyarakat domestik dan para investor asing terancam mundur kembali akibat kepemimpinan Thaksin yang -walaupun memenangkan pemilu secara meyakinkan- dalam menjalankan roda pemerintahan mengalami penurunan efektifitas dan erosi legitimasi. Ada enam faktor yang menyebabkan kelemahan Thaksin dan mengurangi kredibilitasnya sebagai pemimpin Thailand yaitu:

**Pertama**, Skandal tuduhan menyembunyikan harta pribadi milyaran baht, yang menggerus kepercayaan pasar, investor internasional, dan masyarakat dalam negeri.

Terutama karena tindakan itu menyangkut moral-etika dalam kepemimpinan Thaksin. Kebijakan ekonomi taipan telekomunikasi Thailand itu juga masih mencari-cari arah dan format yang tepat, karena kebijakan ekonomi dan keputusan politik lebih terkonsentrasi di tangan PM Thaksin.

**Kedua**, Gaya kepemimpinannya yang one man show, bahkan terkesan dalam

menelola pemerintahan seperti seorang chief executive perusahaan (CEO) ketimbang sebagai perdana menteri. Kekuasannya mengalami personalisasi, hampir mendekati otoritarian, mungkin disebabkan oleh kemenangannya dalam pemilu yang meyakinkan (firm victory) dan latar belakang bisnisnya sebagai taipan telekomunikasi. Ia menanggapi keputusan penting pemerintah oleh dirinya sendiri ketimbang mendelegasikan kepada para menterinya. Rupanya pengumpulan kekuasaan ini berkaitan dengan sikap Thaksin yang cenderung over confidence dan obsesif pada saat ekonomi Thai merosot dan para investor potensial bersikap wait and see. Ia mengumpulkan kekuatan/kekuasaan hingga menggumpal ke dalam dirinya untuk mencerminkan pemimpin yang dinamis yang ingin mensejahterakan rakyat miskin di Thai yang kini menjadi negara yang sedang sulit dan sudah parlous estate.

**Ketiga**, Thaksin telah memecat gubernur bank sentral yang independen dan profesional akibat perselisihan soal suku bunga. Gubernur bank Sentral Thailand Chatumongkol Sonakul (seorang teknokrat berpendidikan Universitas Harvard, AS) baru-baru ini diberhentikan Thaksin dan digantikan oleh Pridyathorn Devakula yang secara kualitatif dan kompetensi masih dibawah Chatumongkol, namun lebih kooperatif dan memilih bekerja dalam tim ketimbang secara individual seperti pendahulunya itu. Perbedaan sikap dan pendapat antara Thaksin dan Chatumongkol dilatarbelakangi perbedaan visi, misi, dan konflik kepentingan soal penanganan kebijakan moneter. Chatumongkol menghendaki sukubunga yang rendah untuk deposito 2-3% dan pinjaman 7%. Di mata Chatumongkol kenaikan sukubunga tak akan meningkatkan pembelanjaan konsumsi. Alasan Chatumongkol ini dibenarkan dan didukung IMF. Memang, kebijakan moneter Chatumongkol mendapat dukungan IMF dan pasar. Karena itu, pemecatannya merupakan berita buruk bagi Thailand dan berdampak negatif bagi citra (image) pemerintahan Thaksin di kalangan domestik, investor, dan dunia internasional.

**Keempat**, Thaksin membela para konglomerat ketimbang rakyat banyak. Ini bertentangan dengan kampanyenya yang bercorak populistik. Atas kebijakan Thaksin, maka Thai Asset Management Corporation mengambil alih utang yang bermasalah atau macet lebih dari 1 trilyun baht demi kepentingan para bankir dan pengusaha besar, yang merupakan sekutu-sekutu politiknya yang terpercaya.

Penghapusan utang (write off) para kapitalis besar itu, sungguh mengecewakan rakyat banyak. Thaksin dituduh telah "mengkhianati" janjinya sendiri untuk memberdayakan rakyat kecil. Untuk mengalihkan kekecewaan rakyat itu, Thaksin cenderung menekankan "nasionalisme semu" dan menyatakan akan mengubah perekonomian dari model pembangunan AS dan Jepang ke lingkungan yang

lebih ramah lingkungan dengan fokus pengembangan usaha kecil dan menengah. Namun hasilnya masih tanda tanya. Perlu bukti nyata dan waktu untuk melaksanakannya. Hal ini juga mencerminkan bahwa Thaksin mulai mengalami disorientasi dan kehilangan sense of direction dalam kebijakan ekonominya ditengah gelombang globalisasi kapitalisme Kelima, rakyat melihat Thaksin gagal memenuhi janji untuk mensejahterakan rakyat. Janji populisme Thaksin ternyata mengecewakan rakyat.

Buktinya, meski pemerintah berjanji akan memberikan moratorium utang 3 tahun bagi 25 % petani Thai, hanya kaum tani yang memiliki utang di bawah US\$2.200 (100 ribu baht) yang memperoleh moratorium itu. Janji untuk menyediakan dana pinjaman bergulir (revolving loan) bagi 77 ribu desa, ternyata dalam praktiknya hanya akan diberikan bagi desa-desa yang secara studi kelayakan dinilai memenuhi persyaratan dan kriteria, yang dianggap viable. Janji skema penyediaan kesehatan dan pengobatan sebesar 30 baht ternyata hanya diberikan kepada mereka yang tak punya asuransi kesehatan.

Keenam, Thaksin juga mengecam pers dan media massa yang mengkritiknya secara tajam. Ia memerintahkan para pemimpin redaksi untuk mengurangi kritik dan kecaman pedas atas pemerintahannya. Hal ini, kata Ubonrat Siriyuvasak, pakar komunikasi Chulalongkorn University, Thailand, telah mengesankan Thaksin tipikal seorang pendatang baru politik yang tidak sabar dan tidak tahan dengan kritik media massa.

Kritik terhadap pemerintahan Thaksin berarti juga kritik terhadap kapitalis besar Thailand. Sering terjadi, perusahaan besar yang Thaksin miliki atau milik koleganya, menghentikan pemasangan iklan bagi pers yang mengkritiknya. Misalnya, seperti yang dialami dwimingguan Prachachart yang kehilangan iklan dari perusahaan Shin Corporation (yang didirikan Thaksin) karena kritiknya terhadap pemerintahan Thaksin. Sedangkan harian berbahasa Inggris the Nation juga sempat ditelepon oleh polisi yang menginterogasi Penrednya, Panan Janviroj, untuk meminta sumber berita atas pemberitaannya yang mengkritik kunjungan Menlu Thai Surakiart Sathirathai ke Burma. Ini merupakan hal yang pertama kali terjadi di Thailand pada era demokrasi, sehingga mengejutkan publik politik negeri Siam itu.

### Otoritarian dan Arogan

Thaksin mengklaim keselamatan politiknya merupakan kepentingan nasional Thailand, seraya mengklaim masa depan negeri itu terletak di tangannya. Padahal para investor dan para pemilihnya menghendaki Thailand dengan pemulihan ekonomi, stabilitas politik, dan good governance. Bukanlah sekadar janji, perayaan, dan wacana. Gaya Thaksin dalam berkuasa terkesan otoritarian dan arogan. (Far Eastern Economic Review, 31 Mei

2001).

Akibatnya, kini para investor luar dan dalam negeri khawatir dengan stabilitas politik Thailand menyusul menurunnya popularitas, kredibilitas, dan legitimasi Thaksin, yang ditandai dengan mata uang baht yang melemah dan ekspor Thai yang menurun dan utang nasional yang 60 persen dari GDP.

Thaksin kemudian menyatakan akan memfokuskan pada permintaan domestik dan investasi, dengan tak lagi mengandalkan pada hubungan dan perdagangan luar negeri, yang berarti menekankan semangat nasionalistik. Perekonomian yang terbuka dengan usaha swasta, free enterprise, yang bersifat persaingan bebas tetap dipertahankan

"Namun Thailand akan bergerak menuju integrasi ekonomi ke negara-negara Asia. Kami berpikir global bertindak lokal, sesuai kepentingan nasional," kata Thaksin di depan the 2001 Fortune Global Forum, Hong Kong belum lama ini. Dengan masalah Thaksin, maka persoalan akuntabilitas, transparansi, dan etikamoral dalam kepemimpinan politik Thailand menjadi perhatian masyarakat. Agaknya, meminjam wacana Benedict Anderson (gurubesar studi Asia Tenggara di Cornell University, AS), kualitas moral-etik Thaksin sedang dalam ujian. Jika lulus, akan menentukan kualifikasinya untuk memimpin Thailand. Sementara kalangan oposisi sedang menanti runtuhnya mandat legal Thaksin sebagai perdana menteri, para analis politik Bangkok melihat "serigala dan buaya politik" akan muncul dan menyerangnya jika Thaksin tak lagi memiliki kekuasaan yang sah, legal, dan konstitusional.

Bulan ini nasib politik Thaksin ditentukan, yang akan mempengaruhi jalannya roda pembaruan dan pembangunan di Thailand. Jika ia dinyatakan bersalah oleh Mahkamah Konstitusional, maka berakhir lah jabatan PM-nya.

Bila nasib Thaksin yang memiliki basis massa pendukung yang kuat, ditentukan oleh Mahkamah Konstitusional, maka di Indonesia nasib mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang merosot popularitas, kredibilitas dan legitimasinya, (Wahid juga memiliki basis massa yang kuat) telah ditentukan oleh SI-MPR.

Perkembangan politik di Thailand dan Indonesia ini memiliki kemiripan yakni "fluktuasi instabilitas", yang sudah tentu berdampak ke ASEAN. Kalau pada akhirnya terjadi perubahan kepemimpinan nasional di kedua negara itu, maka yang terpenting adalah bagaimana para pengganti mereka mampu mengelola dan mengendalikan dampak ekonomi dan sosial-politik dari perubahan rezim itu, guna membangun kembali stabilitas politik, keamanan dan ekonomi.

*Penulis adalah alumnus FEUI, staf pengajar Program Extension FE-UI dan LEAD Fellow, Direktur Freedom Foundation, aktivis prodemokrasi (Prodem).*